



Laporan Kinerja Triwulan 1 BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP Provinsi Sumatera Utara selama Triwulan 1 Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No	Sasaran	Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	3.92	%	0	0
2.	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	52.95	%	0	0
3.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	A	Predikat	-	-
4.	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	94.50	Nilai	0	0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



1. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan indikator kinerja [IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Kegiatan yang telah dilakukan dalam priode Januari s.d Maret 2024 dalam upaya mendukung capaian IKK 1.1. yaitu :

1. Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan Februari Tahun 2024, yang didalam pertemuan tersebut agenda Ppoknya yaitu pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah, Satuan tugas PPK dan TPPK-SP, Perencanaan Berbasis Data daerah (IKUR Bidang Pendidikan) dan Program Prioritas Kemendikbudristek lainnya.
2. Advokasi dan Pendampingan Percepatan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan (PPK) dan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (TPPKSP)
3. Webinar Transisi PAUD ke SD dalam menciptakan transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD
4. Webinar Sosialisasi Pendaftaran IKM dan Festival Kurikulum Merdeka Tahun 2024
5. Pemetaan Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak (PSP) dan sekolah Imbas
6. Advokasi dan Pendampingan Percepatan Penyaluran Dana BOS Tahap I Tahun 2024

Dari beberapa kegiatan diatas sudah beberapa capain yang diperoleh yaitu antara lain: capaian pembentukan TPPKSP Jenjang SD 95,97%, SMP 95,91% dan SMA 98,42% dan capaian pembentukan PPK Pemerintah Daerah telah Upload SK Satgas sebanyak 42,42 % (14 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi). Penyaluran Dana BOS Tahap I Tahun 2024 diharapkan dapat tercapai sudah mencapai 80% diharapkan pada bulan Mei - Juni 2024 sudah mencapai 95%-100%.

Kendala / Permasalahan :

1. Menghadirkan narasumber dalam rapat rutin PMO Bulan Maret (Sekretadis Daerah, Kepala BKD dan Kepala BAPPEDA Kab/Kota/Prov) terkendala dengan kegiatan di Pemerintah daerah sehingga tidak semua Kab/Kota dapat menghadirkan narasumber terkait.
2. Kendala/ permasalahan dalam advokasi PPK dan TPPKSP yaitu antara lain :Untuk SK Satgas Pemda terkendala lamanya proses di biro Hukum Kantor Bupati, Menu unggah SK pada Portal TPPK tidak muncul sehingga sekolah tidak bisa mengupload SK, Dinas Pendidikan yang harus berkoordinasi dengan beberapa OPD terkait sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembentukan satgas PPK dan TPPKSP, Pergantian Kepala Daerah yang mendadak karena terkena Kasus, seperti Kabupaten Labuhanbatu, Pemahaman Satpen terkait pengisian kepanitiaan di aplikasi



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



dapodik dan penggunaan dasbor TPPKS yang masih rendah, Letak Geografis Satuan Pendidikan terkait jaringan internet yang susah sehingga menyulitkan dalam mengupload SK Satgas.

3. Kegiatan Webinar yang dilaksanakan secara daring sehingga tidak dapat dipantau kehadiran dan keahaman peserta yang mengikuti kegiatan.
4. Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Percepatan penyaluran Dana BOS Tahap 1 ditemui beberapa kendala antara lain Ketidak cocokan data pada Kementerian Keuangan dengan data dari operator pusat, ada beberapa sekolah yang sudah tutup karena tidak ada lagi siswa yang mendaftar di Sekolah, Koneksi ARKAS dan MARKAS terkadang lambat, Penginputan yang kurang teliti, Pergantian Kepala sekolah maupun admin/operator pengelola dana BOS.
5. Kemampuan staf BPMP dalam mengadvokasi daerah masih beragam dan perlu ditingkatkan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Pemberitahuan undangan sebagai narasumber disampaikan minimal seminggu sebelum acara dilaksanakan. jika narasumber tidak dapat hadir Wali wilayah terus berkoordinasi dengan daerah binaannya untuk memantau perkembangan kesediaan narasumber dan segera memohon pergantian pejabat yang dibawahnya yang memahami materi pokok sebagai pengganti.
2. Solusi untuk kendala/ permasalahan dalam advokasi PPK dan TPPKSP yaitu antara lain: Koordinasi Secara Intens dan berkala dengan Dinas Pendidikan melalui telepon dan *whatsaap*, Advokasi dan Pendampingan terhadap Dinas Pendidikan Kab/Kota, Advokasi dan pendampingan langsung kepada satuan pendidikan, Melalui Kegiatan PMO dengan melibatkan OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas PPPA dan Biro/Bagian Hukum Pemerintah Daerah, Menyediakan rekap data per jenjang, per provinsi/kota/kab secara berkala dan mengirimnya ke Grup *Whatsaap* BPMP dan Dinas Pendidikan, Memfasilitasi peningkatan pemahaman SDM terkait Regulasi TPPK dan Portal PPKSP, Optimalisasi Peran Wali Wilayah, Melapor kepada *Help Desk* terkait masalah upload SK.
3. Melakukan koordinasi awal sebelum melakukan kegiatan Webinar dengan dinas pendidikan kab/Kota sehingga informasi pelaksanaan webinar dapat diketahui secara luas oleh para calon peserta.
4. Terkait Permasalahan Penyaluran dana BOS Tahap 1 Tahun 2024, untuk mengatasi permasalahan yang muncul dapat diatasi antara lain dengan cara :BPMP menyurati Dinas Pendidikan agar dinas menyampaikan permasalahan ke Pusat sehingga Dana BOS segera salur ke Satuan Pendidikan, Dinas pendidikan melakukan pendampingan bagi operator /Admin yang baru sehingga paham tentang MARKAS, Satuan Pendidikan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Cabang Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal melakukan “konfirmasi dinas”, Operator/ Kepala sekolah meningkatkan ketelitian dalam mengelola dana BOS dan menjalankannya sesuai dengan Permendikbudristek no. 63 tahun 2023, Update aplikasi dengan versi terbaru, dan mengupayakan perangkat komputer yang kompatibel.ta webinar di Kab/Kota.
5. Perlunya peningkatan kemampuan SDM BPMP Prov. Sumatera Utara terutama dalam hal kemampuan mengadvokasi pemerintah daerah, kegiatannya berupa Workshop atau Bimtek Peningkatan SDM dan Pengembangan Kapasitas diri.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



2. [SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen] IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen dengan indikator kinerja [IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Kegiatan yang telah dilakukan dalam periode Januari s.d Maret 2024 dalam upaya mendukung capaian IKK 1.2. yaitu:

1. Pendampingan Rapat Rutin PMO Daerah Bulan Februari Tahun 2024, yang didalam pertemuan tersebut agenda Pokoknya yaitu Pengangkatan GP menjadi KS/PS, Satgas PPK dan TPPK-SP, Perencanaan Berbasis Data daerah (IKUR Bidang Pendidikan) dan Program Prioritas Kemendikbudristek lainnya.
2. Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Dapodik Dengan Pemerintah Daerah
3. *Kick-off* Pelepasan Penugasan Peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 7 Tahun 2024
4. Pelaksanaan Uji Petik Anomali Data Sarpras
5. Advokasi Dan Audiensi UPT Kepada Pimpinan Daerah Terkait Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi Kepala Sekolah Atau Pengawas Sekolah
6. Sosialisasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
7. Pendampingan Rakortek Kabupaten/kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT
8. Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Daerah
9. Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan

Dari beberapa kegiatan diatas sudah beberapa capain yang diperoleh yaitu antara lain: Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Dapodik Dengan Pemerintah Daerah telah terlaksana sekitar 80%, Telah terlaksananya kegiatan pelepasan penugasan program kampus mengajar sebanyak 25478 Mahasiswa yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari 33 Kab/Kota/Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 25 Dinas Pendidikan Kab/Kota yang login ke aplikasi sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah, 4 (empat) Kab/Kota dari 33 Kab/Kota telah memiliki SK ULD.

Kendala / Permasalahan :

1. Menghadirkan narasumber dalam rapat rutin PMO Bulan Maret (Sekretaris Daerah, Kepala BKD dan Kepala BAPPEDA Kab/Kota/Prov) terkendala dengan kegiatan di Pemerintah daerah sehingga tidak semua Kab/Kota dapat menghadirkan narasumber terkait.
2. Kurangnya apresiasi dari pejabat terkait dengan Sosialisasi dan Koordinasi Kualitas Dapodik Dengan Pemerintah Daerah.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



3. Tidak semua Mahasiswa, Kepala Sekolah, DPL dan guru mengikuti pesan-pesan penyemangat kepada peserta untuk menjalankan penugasan dan permohonan dukungan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan 7 mengikuti *Kick-Off* Penugasan program Kampus Mengajar angkatan ke-7 Tahun 2024.
4. Operator sekolah belum paham tentang pengisian data sarpras di dapodik
5. Kendala Advokasi dan Audiensi kepada Pimpinan Daerah terkait Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala sekolah yaitu : Komitmen dari Kepala Daerah, Adanya keterbatasan waktu sehingga dikhawatirkan kalau melalui aplikasi akan lama dan mengakibatkan tidak ada kewenangan kepala daerah dalam pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, berhubung masa tenggat waktu Jabatan kepala Daerah, Belum tersosialisasi dengan baik mengenai sistem dampak bila pengangkatan kepala sekolah tanpa melalui aplikasi kepada pejabat utama di daerah.
6. Kendala sosialisasi sistem pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yaitu: Dinas pendidikan Kab/Kota dan Provinsi masih belum beradaptasi dengan kebijakan penggunaan Aplikasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Kuota dan indentifikasi promosi jabatan fungsional guru yang sudah ditetapkan di Aplikasi membuat Pemerintah daerah enggan menggunakan aplikasi.
7. Kendala Pendampingan Rakortek Kabupaten/kota oleh Bappeda Provinsi oleh UPT yaitu Kegiatan secara daring, sehingga tidak dapat di pantau kebenaran dan kephahaman peserta yang mengikuti kegiatan.
8. Waktu untuk merealisasikan pembentukan ULD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan belum disepakatinya kebutuhan adanya ULD di daerah.
9. Kendala Workshop Kebijakan Uji Kesetaraan yaitu banyak peserta yang tidak hadir.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Pemberitahuan undangan sebagai narasumber disampaikan minimal seminggu sebelum acara dilaksanakan. jika narasumber tidak dapat hadir Wali wilayah terus berkoordinasi dengan daerah binaannya untuk memantau perkembangan kesediaan narasumber dan segera memohon pergantian pejabat yang dibawahnya yang memahami materi pokok sebagai pengganti.
2. Menjalin komunikasi lebih intens dengan Dinas Pendidikan
3. Membentuk PIC setiap Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kordinator DPL dan melaksanakan Koordinasi , advokasi melalui Forum Komunikasi dan Koordinasi kegiatan Program Kampus Mengajar Angkatan 7 Tahun 2024
4. Memberi bimbingan terhadap operator yang sekolahnya menjadi sasaran dan meminta dinas agar membimbing operator yang sekolahnya terdapat anomali data sarpras
5. Solusi dari Kendala Advokasi dan Audiensi kepada Pimpinan Daerah terkait Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala sekolah yaitu antara lain: sosialisasi luring/daring, advokasi dan pendampingan langsung ke dinas kab kota, audiensi UPT tentang pengangkatan GP menjadi KS kepada kepala daerah, pendampingan dan motivasi kepada GP agar mau diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah
6. Solusi dari Kendala Sosialisasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yaitu antara lain: Diusulkan Penguatan kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Advokasi kenapa Guru Penggerak yang diangkat dan apa keuntungan mengangkat Guru Penggerak, Contoh atau *Best Practice* Pengangkatan Guru Penggerak yang ada di daerah lain, Advokasi proses pengangkatan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Advokasi penggunaan dashboard aplikasi sistem pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
7. Mencoba memanggil dan menanyakan setiap peserta dari tiap daerah.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



8. Pemerintah daerah diberikan pemahaman yang memadai dan kesempatan untuk membahas hal-hal yang lebih teknis serta rinci mengenai perannya memfasilitasi penanganan pendidikan secara inklusif agar terbentuk persepsi yang sama dan kesediaan untuk membentuk ULD untuk memaksimalkan perannya.
9. Mengirimkan materi serta berkoordinasi dengan dinas pendidikan yang menangani kesetaraan agar tersampaikan kebijakan Uji Kesetaraan

3. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara] IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

Progress / Kegiatan :

Nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 yaitu 84,05 dan mendapatkan predikat A atau memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 dan kelompok kerja. Untuk meningkatkan capaian kinerja [SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara dengan indikator [IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 yaitu :

1. Dokumen Rencana Kerja Tahunan telah dipublikasi dalam laman BPMP Provinsi Sumatera Utara
2. Telah dilaksanakan rapat program kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
3. Penyusunan Laporan Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dan Reviu Rencana Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024
4. Telah dilaksanakan Kegiatan Internalisasi Program Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara dan Penyusunan SKP Tahun 2024.
5. Penandatanganan Pakta Integritas pegawai BPMP Provinsi Sumatera Utara
6. Rapat Evaluasi kegiatan setiap awal bulan untuk mengevaluasi capaian kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.
7. Rapat Tim Pembangunan ZI WBK
8. Penyusunan Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

Kendala / Permasalahan :

1. Rapat Evaluasi kegiatan belum membudaya dilaksanakan pada setiap awal bulan.
2. Implementasi SAKIP masih harus diperkuat dengan melakukan usaha peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Strategi / Tindak Lanjut :

1. Rapat Evaluasi Kegiatan pada awal bulan harus rutin dilaksanakan agar menjadi kebiasaan yang baik di BPMP Provinsi Sumatera Utara.
2. Menjadwalkan program peningkatan kompetensi bagi tim SAKIP dan petugas yang menangani perencanaan termasuk operator aplikasi spasikita dan SAKTI.

4. [SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara] IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

Progress / Kegiatan :

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Provinsi Sumatera Utara Triwulan 1 Tahun 2024 yaitu 97,27. Dari 7 indikator penilain IKPA, BPMP Provisin Sumatera Utara masih perlu ditikantkan pencapaiannya dalam hal indikator Deviasi Hal DIPA 3 yang nilainya hanya mencapai 88,47.

Untuk mengoptimalkan pencapaian IKPA perlu dtingkatkan pengawasan dalam hal Deviasi Hal DIPA 3, Pertanggungjawaban UP/TUP, Penyelesaian Tagihan, Penyampaian data kontrak dan penyerapan anggaran sesuai dengan proyeksi penyerapan anggaran tahun 2024 yang telah disusun.

Kendala / Permasalahan :

1. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan proyeksi yang telah disusun untuk tahun 2024 karena adanya perubahan jadwal kegiatan dari tim kerja PDM.
2. Terdapat indikator pada IKPA yang mendapatkan nilai dibawah 100 yaitu deviasi halaman III DIPA dengan nilai 88,47

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan tetap berkoordinasi dengan Tim kerja PDM terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Mengupayakan agar penyerapan anggaran sesuai dengan Proyeksi Halaman DIPA 3.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output	Satuan	Volume	Capaian	Sisa Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
[419523.DI.6397.QDB.750] Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	13.702	3.420	10.282	25.697.125.000	2.417.629.381	23.279.495.619
[419523.DI.6397.QDB.850] Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	9.064	2.266	6.798	553.552.000	0	553.552.000
[419523.WA.2005.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	1	475.000.000	12.049.300	462.950.700
[419523.WA.2005.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	1	26.486.216.000	5.308.209.250	21.178.006.750
[419523.WA.2005.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	0	1	775.473.000	0	775.473.000
[419523.WA.2005.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Unit	1	0	1	224.527.000	0	224.527.000
Total					54.211.893.000	7.737.887.931	46.474.005.069

D. Rekomendasi Pimpinan

IKK 1.1.

Untuk Kab/kota yang belum membentuk satgas TPPKS, diharapkan agar Wali wilayah terus memantau dan berkoordinasi dalam upaya percepatan pembentukan satgas.

Diharapkan kepada Tim Kerja 05, giat melakukan advokasi dan pendampingan penyaluran Dana BOS.

Kepada Lead PMO agar merealisasikan program peningkatan kompetensi SDM.

IKK 1.2.

Kepada Tim Kerja 03, agar terus melakukan advokasi terkait pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah atau pengawas.

Kepada Tim Kerja 01, untuk terus memonitor pembentukan ULD.



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



IKK.2.1.

Agar dilakukan pembiasaan untuk tertib dalam mendokumentasikan rapat-rapat di dalam kantor.

IKK 2.2.

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan tetap berkoordinasi dengan Tim kerja PDM terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Mengupayakan agar penyerapan anggaran sesuai dengan Proyeksi Halaman DIPA 3.

Medan, 20 Mei 2024

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tajuddin Idris, S.Si., M.T
NIP 197203302002121002



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

